



Transformasi Manajemen Pemerintah Dalam Keterbukaan Informasi Publik Pada Era Digital

Helmi Satriananda Divantika, Dyah Mutiarin

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Correspondence email: helmi.s.isip18@mail.umy.ac.id

Received: 24/06/2022. Revised: 06/07/2022. Published: 24/01/2023

Abstract

Disclosure of public information is an inevitable need in a digital society. In 2014 the Yogyakarta Special Region Government through the DIY Regional Development Planning Agency issued a development data application called Dataku, which in 2019 was managed by the Technical Implementation Unit of the Regional Research, Development and Statistics Center (BPPSD) of the Development Planning Agency. Special Region of Yogyakarta. This application aims to facilitate Regional Apparatus Organizations (OPD) in finding statistical data. This application, which has been operating for six years, is certainly in the implementation stage undergoing a transformation in information management, which was previously done manually, now digitizing data. Based on this, it was interesting for researchers to make the Dataku application as an object in data collection and involve the Technical Implementation Unit of the Regional Research, Development and Statistics Center (BPPSD) of Bappeda DIY as the person in charge of the Dataku Application. This study aims to analyze the existing transformations with the presence of the Dataku application. This study uses a qualitative descriptive method which in the process of collecting data uses interview data from related parties and documentation as a data source. The results of this study were divided into 3 phases, namely phase 1: thawing, phase 2: changing, phase 3: refreezing, undergoing a better transformation in each phase. The implementation of this application is considered to help OPD and the community in obtaining development data. There are still shortcomings in terms of completeness of data and lack of information that this application can be used by the public, but this application can still be improved to reach a wider community.

Keywords: Dataku Application; Management Transformation; Public Information disclosure; Digital

Abstrak

Keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan yang tidak terelakan dalam masyarakat digital. Pada tahun 2014 Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIY mengeluarkan aplikasi satu data pembangunan yang diberi nama Dataku, yang kemudian pada tahun 2019 pengelolaan

aplikasi ini berada pada Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam mencari data- data statistik. Aplikasi yang sudah enam tahun beroperasi ini tentu dalam tahapan implementasi mengalami transformasi dalam pengelolaan informasi yang sebelumnya dilakukan secara manual, sekarang melakukan digitalisasi data. Berdasarkan hal tersebut menarik peneliti untuk menjadikan aplikasi Dataku sebagai objek dalam pengambilan data dan melibatkan Unit Pelaksana Teknis Balai Penelitian, Pengembangan, dan Statistik Daerah (BPPSD) Bappeda DIY sebagai penanggung jawab Aplikasi Dataku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis transformasi yang ada dengan hadirnya aplikasi Dataku. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang dalam proses pengumpulan data menggunakan data wawancara dari pihak yang berkaitan dan dokumentasi sebagai sumber data. Hasil penelitian ini yang dibagi dalam 3 fase yakni fase 1: Pencairan, fase 2: Mengubah, fase 3: pembekuan kembali, mengalami transformasi yang lebih baik dalam setiap fase. Implementasi aplikasi ini dianggap membantu para OPD maupun masyarakat dalam memperoleh data pembangunan. Masih terdapat kekurangan dalam hal kelengkapan data dan kurangnya informasi bahwa aplikasi ini bisa digunakan oleh publik, akan tetapi aplikasi ini tetap dapat terus ditingkatkan untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Kata kunci : Aplikasi Dataku; Transformasi Manajemen; Keterbukaan Informasi Publik; Digital

Pendahuluan

Digitalisasi telah berkembang secara cepat di Indonesia dan memengaruhi segala aspek, tidak terkecuali dalam bidang pemerintahan. Perkembangan digitalisasi secara cepat ini membuat pemerintah harus beradaptasi dengan cepat, baik dari tingkat pusat sampai daerah. Salah satu tuntutan pada era digital seperti ini adalah cepat dan tepatnya informasi yang disampaikan oleh pemerintah. menghadapi tantangan perkembangan teknologi informasi tersebut, pada tahun 2003 dengan adanya Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government* yang menandai bahwa pemerintah perlahan mulai menerapkan *e-government*. Menurut worldbank (2021) *e-government* sendiri merupakan penggunaan teknologi informasi oleh pemerintah yang memiliki kemampuan untuk memudahkan hubungan antara masyarakat, bisnis, dan lembaga pemerintah. Implementasi *e-government* juga perlu melihat kesiapan infrastruktur jaringan internet dan komunikasi yang ada pada suatu daerah.

Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang pengembangan *e-government* membuat Pemerintah Daerah istimewa Yogyakarta merespon dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 5 tahun 2006 tentang petunjuk teknis pemanfaatan jaringan komputer dalam lingkup Pemerintahan Daerah Istimewa Yogyakarta. Secara singkat berdasarkan legalitas tersebut, dapat dikatakan bahwa di



Yogyakarta sendiri *E-Government* dilaksanakan sejak 2006. Sejak tahun 2006 pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta secara konsiten mengembangkan dan melakukan implementasi *E-Government* secara bertahap. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sendiri sudah cukup lama dalam menerapkan *E - Government*. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa aplikasi dan situs website yang dimiliki oleh Pemda DIY.

Pemerintah sendiri telah mengeluarkan undang-undang keterbukaan informasi No. 14 tahun 2008. Undang-undang tersebut menjadi landasan pemerintah pusat maupun daerah dalam mengatur keterbukaan informasi publik. Undang-undang tersebut menjadi acuan lembaga negara maupun pemerintah daerah dalam mengatur seluk beluk keterbukaan informasi publik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang diatur dalam PERDA DIY NO. 3 tahun 2019 dan Peraturan Daerah (Perda) tentang pengelolaan keterbukaan informasi yang baru saja disahkan pada tahun ini. Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi publik menambah kuat keharusan pemerintah dalam penyediaan informasi publik. Dalam Peraturan Daerah (Perda) ini pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mengatur secara rinci tentang pengelolaan penyediaan informasi publik. ini juga sekaligus sebagai bentuk keseriusan pemerintah daerah DIY dalam keterbukaan informasi publik. Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) No. 4 Tahun 2021 tentang keterbukaan informasi publik tentu saja menambah kepastian hukum yang ada. Hadirnya Peraturan Daerah (Perda) tersebut membuat Organisasi Perangkat Daerah harus mengikuti peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik.

Berdasarkan data kepuasan masyarakat terhadap kinerja Bappeda DIY cukup baik dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Selain mempunyai tugas pokok sebagai badan perencanaan daerah, Bappeda DIY juga memiliki tugas untuk menyebarkan informasi publik melalui PPID pembantu Bappeda DIY. Bappeda DIY juga cukup inovatif dalam mengelola informasi publik dengan meluncurkan beberapa aplikasi. Hasil monitoring dan evaluasi dari PPID Bappeda DIY tahun 2020 menyebutkan bahwa jumlah pengunjung dan permohonan informasi melalui Bappeda DIY mencapai 555.321 pengunjung. Sedangkan permohonan informasi publik yang datang langsung hanya terdapat 106 pengunjung saja. Hal tersebut membuktikan bahwa pola masyarakat dalam melihat informasi publik mulai bergeser pada sistem daring. Pengunjung secara daring yang cukup tinggi, maka PPID pembantu Bappeda DIY dituntut untuk bisa terus beradaptasi dalam pelayanan informasi publik. Bappeda DIY sendiri dapat dibilang cukup adaptif dengan meluncurkan beberapa aplikasi dengan pembagian layanan informasi yang cukup spesifik, anatara lain : JogjaPlan (perencanaan), Sengguh (pengendalian), Dataku (aplikasi data) dan geoportal (peta geospasial). Pemerintah Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta melalui Badan Perencanaan Pembangunan DIY melakukan inovasi dengan mengeluarkan inovasi terhadap aplikasi satu data pembangunan. Aplikasi ini secara resmi diberi nama Dataku pada tahun 2014. Sudah lebih dari 5 tahun semenjak aplikasi ini digunakan oleh Organisasi Perangkat daerah (OPD) maupun masyarakat umum untuk berbagai keperluan. Aplikasi satu data

pembangunan yang dikembangkan oleh Bappeda ini menjadi menarik karena sudah dikembangkan dan digunakan cukup lama.

Dataku DIY merupakan salah satu aplikasi yang banyak menampilkan data-data pembangunan maupun info grafis dari beberapa OPD yang ada di DIY. Dataku DIY sendiri merupakan aplikasi yang berbasis internet dan dapat diakses oleh Publik. Dataku DIY sendiri dapat disebut sebagai wujud satu data pembangunan, hal ini dapat memudahkan masyarakat maupun pemerintah kabupaten kota dalam akses informasi. Dalam pengelolaan aplikasi ini Bappeda DIY juga bekerjasama dengan Pemda DIY, kabupaten kota, dan lembaga vertikal yang ada di DIY. Dengan hadirnya aplikasi ini PPID pembantu Bappeda DIY dapat memberikan informasi dari hasil pembangunan ke beberapa pihak sekaligus yakni, pemerintah ke pemerintah (G to G), pemerintah ke pebisnis (G to B), pemerintah ke akademisi (G to A), dan pemerintah ke masyarakat (G to C). Mewujudkan sistem keterbukaan informasi publik yang semakin baik, maka diperlukan proses transformasi manajemen pemerintahan untuk menghadapi tuntutan serta konsekuensi dari perkembangan teknologi digital. Maka penelitian ini akan membahas tentang proses transformasi pemerintah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam keterbukaan informasi publik pada era digital, dengan berfokus pada pengelolaan aplikasi Dataku DIY.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut (Nugrahani, 2014) penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif merupakan penelitian yang menekankan catatan dengan deskripsi kalimat yang menggambarkan situasi yang sebenarnya untuk mendukung penyajian data. Dengan menggunakan metode penelitian ini maka peneliti berusaha untuk menganalisis berbagai macam data sesuai dengan bentuk aslinya. Data dalam penelitian ini menggunakan dua sumber yakni data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan dari hasil wawancara dengan Bappeda DIY, UPT BPPSD Bappeda DIY, dan Masyarakat pengguna aplikasi DatakuDIY. Data sekunder didapat dari dokumen SOP aplikasi Dataku DIY, aplikasi Dataku DIY dan dokumen penunjang lainnya.

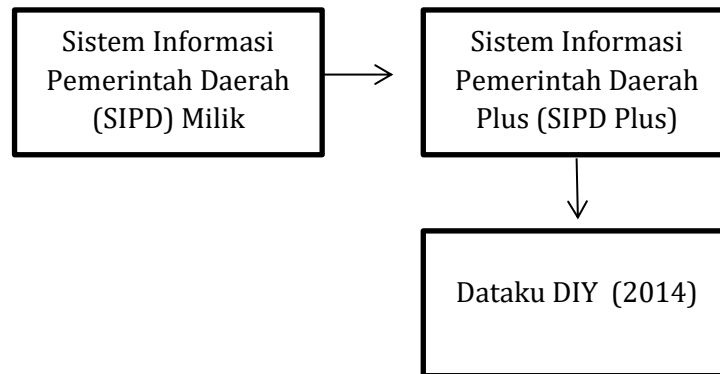
Hasil dan Pembahasan

Temuan penelitian ini mendeskripsikan proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik pada aplikasi DatakuDIY dapat dilihat dalam 3 tahapan yakni fase pencairan, mengubah dan pembekuan kembali. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan dari Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD) Bappeda DIY selaku pengelola aplikasi DatakuDIY dan dokumen terkait, maka dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, fase pencairan merupakan fase paling pertama dalam proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik. Fase ini merujuk pada tahap introduksi atau pengenalan terhadap program baru tersebut. Tahapan ini dibagi dalam 2 indikator :

a) Penyiapan aplikasi *Dataku DIY*

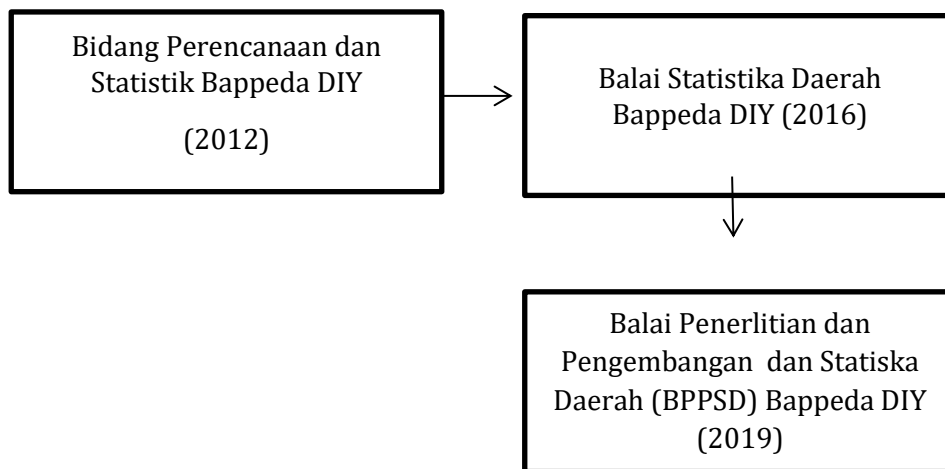
Dataku DIY merupakan aplikasi satu data pembangunan daerah yang dikelola oleh Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD) Bappeda DIY. Aplikasi ini memuat data pembangunan pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi DIY menjadi satu.



Gambar 1.
Sumber: Diolah oleh Peneliti

Aplikasi ini berawal dari adanya aplikasi SIPD milik Kemendagri. SIPD milik kementerian dalam negeri ini dianggap masih kurang maksimal dalam penggolongan setiap elemen data yang ada pada setiap provinsi. Berdasarkan wawancara kepala seksi data dan statistik, peneliti menyimpulkan bahwa asal muasal inisiatif lahirnya Aplikasi Dataku berasal dari kurangnya aplikasi SIPD milik Kementerian Dalam Negeri ini dalam akomodasi data yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ditambah dengan lamanya proses perbaikan aplikasi oleh Kementerian Dalam Negeri. Bappeda kemudian berinisiatif dengan membuat aplikasi SIPD Plus atau Aplikasi satu data pembangunan. Tahun 2014 aplikasi ini resmi berganti nama menjadi Dataku. Pada prosesnya aplikasi Dataku mengacu pada landasan hukum tentang satu data pembangunan, karena aplikasi ini berawal dari SIPD yang berfokus pada data statistik pembangunan.

Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga membuat landasan hukum untuk mendukung aplikasi satu data pembangunan. Pemerintah Provinsi DIY mengeluarkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 3 Tahun 2020 tentang Satu Data Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, setelah sebelumnya pemerintah pusat mengatur tentang satu data pembangunan dalam Perpres No. 39 tahun 2019. Aplikasi ini dalam penyiapannya juga tetap memperhatikan undang-undang keterbukaan informasi publik dengan membuka akses aplikasi ini ke publik, sehingga masyarakat luas bisa mengaksesnya.



Gambar 2.
Bagan Perubahan Pengelolaan Aplikasi Dataku
Sumber : Diolah oleh Peneliti

Pengelolaan aplikasi ini berada pada Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statistika Daerah (BPPSD) yang merupakan salah satu UPT di Bappeda DIY, hal tersebut sesuai dengan perturan perundang-undangan dan Perda yang berlaku. Pergub DIY No. 3 tahun 2020 menyatakan bahwa pengelolaan satu data tersebut berada di bawah kewenangan statistika. Hasil wawancara peneliti menyatakan bahwa pengelolaan aplikasi Dataku ini berubah 3 kali dari tahun 2012. Berdasarkan wawancara tersebut, peneliti membuat bagan tentang perubahan pengelolaan aplikasi Dataku, yang bisa dilihat pada bagan 2. Tahun 2012 Bappeda belum mempunyai pengelola sendiri untuk mengelola aplikasi satu pintu data pembangunan, kemudian tahun 2016 Bappeda mempunyai UPT baru dengan nama Balai Statistika Daerah yang kemudian pada tahun 2019 berganti nama kembali menjadi Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statistika Daerah (BPPSD) sampai sekarang.

b) Pengenalan aplikasi *Dataku DIY*

Tahapan proses pengenalan aplikasi Dataku DIY ini bertujuan untuk mengenalkan gambaran umum, manfaat, dan cara kerja dari aplikasi Dataku DIY. Pengenalan aplikasi dataku dilakukan dengan melakukan pembentukan team untuk melakukan sosialisasi kepada para OPD untuk mengenalkan aplikasi Dataku DIY ini. Pengelola aplikasi Dataku DIY juga melakukan pelatihan, baik untuk para OPD maupun pengelola sendiri. OPD ikut mendapatkan pelatihan karena dalam pelaksanaannya para produsen data ataupun OPD melakukan *input* data secara mandiri dalam aplikasi, yang kemudian diverifikasi oleh pengelola aplikasi Dataku DIY. Sosialisasi dilakukan setiap tahun terhadap para produsen data ataupun OPD untuk mensosialisasikan perkembangan terbaru dari aplikasi Dataku, sedangkan pelatihan hanya dilakukan pada awal – awal adanya aplikasi Dataku ini

dikarenakan tidak ada perkembangan ataupun perubahan yang terlalu signifikan dengan aplikasi ini.

1. Fase 2 : Mengubah (*change*)

Fase Mengubah (*change*) merupakan fase kedua dari proses transformasi manajemen keterbukaan informasi publik. Fase ini berisi implementasi dan pemanfaatan dari adopsi sebuah program ataupun aplikasi baru tersebut, yakni pemanfaatan dan penggunaan dari aplikasi Dataku DIY. Tahapan ini dibahas dengan 2 indikator untuk dapat mengukur proses implementasi serta pemanfaatan pada aplikasi dataku DIY, yakni:

a) Penggunaan aplikasi *Dataku DIY* bagi Bappeda dan OPD DIY

Tahapan penggunaan aplikasi Dataku DIY bagi Bappeda dan OPD DIY merupakan bagian dari implementasi perubahan dengan aplikasi tersebut. Aplikasi satu data ini sangat berguna dan bermanfaat bagi OPD – OPD yang ada di DIY dikarenakan semua pembuatan dokumen membutuhkan data – data dari berbagai OPD, mulai dari OPD yang berada di provinsi sampai pada kabupaten atau kota. Hasil wawancara dengan kepala seksi data dan statistik UPT BPPSD Dataku DIY menjadi rujukan untuk perencanaan dan pelaksanaan evaluasi pembangunan di DIY sampai pada level kabupaten dan kota, jadi semua harus mengacu pada dataku sehingga tidak diperbolehkan langsung mengambil data pada OPD kecuali yang ada di dataku tidak ada

Data – data yang ada pada aplikasi Dataku DIY tersebut dimanfaatkan oleh OPD dan Bappeda khususnya untuk mendukung proses perencanaan pembangunan seperti : Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap satu tahun sekali, Renja Pembangunan jangka menengah Daerah (RPJMD) setiap lima tahun sekali, dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap akhir tahun. Organisasi Perangkat Daerah yang ada pada lingkup Pemda DIY maupun kabupaten kota yang ada di DIY dapat memanfaatkan Dataku DIY untuk merancang dokumen lain seperti Rencana Strategis (Renstra) setiap 5 tahunan dan Rencana Kerja (Renja) setiap 1 tahun sekali. Adanya aplikasi Dataku DIY juga dapat membuat kinerja setiap OPD yang ada pada lingkup Pemda DIY efisien. Setiap OPD tidak perlu lagi berkirim surat ataupun bertatap muka untuk meminta data, cukup dengan membuka aplikasi Dataku DIY tersebut maka data – data yang dibutuhkan akan tampil.

b) Pemanfaatan aplikasi Dataku DIY bagi Masyarakat

Aplikasi Dataku DIY memberikan manfaat lain untuk masyarakat umum. Masyarakat dapat melihat data – data pembangunan pada aplikasi Dataku DIY, cukup hanya dengan membuka aplikasi yang bisa diakses kapanpun, dimanapun, dan oleh siapapun. Masyarakat bisa mengakses aplikasi ini dengan mudah, pada tahun 2021 jumlah kunjungan pada aplikasi ini mencapai 374.012 kunjungan. Bisa dilihat bahwa ribuan masyarakat telah melihat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) dalam segala bidang. Dapat dikatakan bahwa manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat langsung adalah keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi

publik ini dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang hendak melihat dan mengawasi kinerja pemerintah. Adanya aplikasi Dataku DIY ini membuat masyarakat bisa mengkritik dan mengawasi kinerja pemerintah berdasarkan data yang ada pada aplikasi. Akademisi ataupun mahasiswa yang merupakan bagian dari masyarakat juga dimudahkan dengan data – data yang ada pada aplikasi Dataku DIY untuk menjadi bahan penelitian. Aplikasi Dataku dapat memudahkan masyarakat maupun peneliti dalam mencari data – data statistik pembangunan yang berada pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses birokrasi dalam mendapatkan informasi yang dulu terkesan ribet dan susah, kini dapat dijangkau masyarakat dengan mudah melalui aplikasi. Meskipun dikeluhkan juga ada beberapa data yang kurang lengkap. Melihat kebutuhan masyarakat ataupun peneliti dalam hal data statistik pembangunan tersebut, jumlah kunjungan 374.012 kunjungan tersebut bisa terus bertambah dan meningkat jika diimbangi oleh publikasi dari pengelola bahwa aplikasi ini bisa diakses oleh masyarakat umum. Peneliti melihat jarang nya publikasi baik di media sosial maupun media massa bahwa aplikasi ini dapat digunakan untuk masyarakat secara luas. Kebermanfaatan aplikasi ini bagi masyarakat juga makin terasa jika banyak masyarakat umum yang tahu tentang aplikasi ini.

2. Fase 3 : Pembekuan Kembali (*refreezing*)

Fase pembekuan kembali merupakan fase paling akhir dari transformasi manajemen keterbukaan informasi publik. Fase ini menjadi sangat penting untuk mempertahankan perubahan – perubahan yang sudah ada. Fase pembekuan kembali ini dalam konteks transformasi manajemen keterbukaan informasi publik akan dibahas dalam penelitian ini dalam 3 indikator, sebagai berikut :

a) Perubahan sikap (*Sharing, Learning, Collaborating*)

Hadirnya aplikasi Dataku DIY tentu membawa dampak perubahan khususnya pada pengelola dan pihak – pihak yang terlibat. Perubahan direspon positif oleh pihak – pihak yang terlibat karena hadirnya aplikasi Dataku dianggap lebih memudahkan pekerjaan dalam segi *sharing* data. Proses berbagi data lebih memudahkan dibandingkan dahulu ketika berbagi data masih dilakukan secara manual bukan aplikasi. Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perubahan yang ada di respon secara positif, karena membuat pekerjaan yang ada lebih mudah. Proses *sharing* data yang sebelumnya bersifat formal, mulai dari berkirim surat untuk meminta data, mengadakan rapat, dan mengirim data membutuhkan waktu yang cukup lama. Sekarang menjadi lebih mudah karena beberapa data sudah diinput oleh masing – masing OPD di aplikasi Dataku. Proses perubahan selain terdapat hal yang memudahkan tentu, akan ada kendala dalam setiap perubahan. Salah satu kendala dialami adalah SDM dari setiap OPD yang bertugas untuk memasukkan data pada aplikasi mengalami pergantian secara cepat, sehingga tidak ada yang meneruskan kembali.

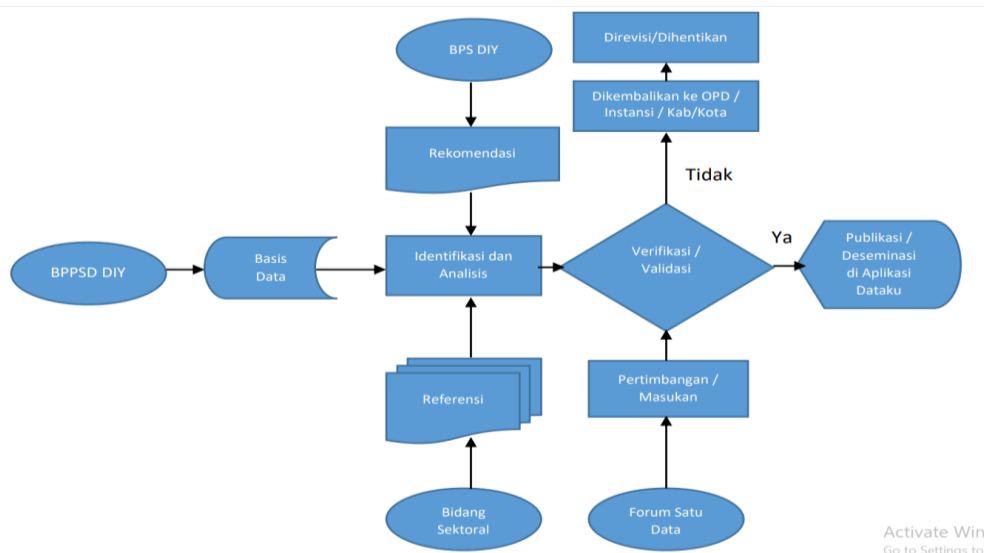
b) Kumpulan Data

Kumpulan data atau koleksi data menjadi bagian penting dalam keterbukaan informasi publik. Semakin banyak data yang dipublikasi pada aplikasi artinya semakin

baik aplikasi tersebut. Data – data yang berada pada aplikasi dataku berasal dari OPD, lembaga horizontal, lembaga vertical yang ada pada lingkup Daerah Istimewa Yogyakarta. Total jumlah data pada aplikasi dataku sejumlah 4.522 sub elemen data yang terbagi ke dalam 395 elemen data dan 42 urusan. Jumlah data sebanyak itu bukanlah jumlah data yang sedikit untuk dikelola dan masuk dalam satu aplikasi, akan tetapi masih ada beberapa dataset yang kosong. Berdasarkan wawancara dengan masyarakat pengguna aplikasi, keluhan tentang bahwa ada beberapa data yang tidak ada dalam aplikasi tersebut peneliti kemudian mengecek beberapa sample data dan memang benar ada data – data yang tidak ada dan hanya menampilkan nomor –nomornya saja tanpa ada datanya. Akan lebih jika pengelola aplikasi *Dataku* bisa melengkapi dan melakukan pengecekan data – data yang kurang ataupun kosong secara rutin. Kumpulan data yang ada pada aplikasi ini mayoritas berbentuk data statistic yang kemudian diolah menjadi beberapa tampilan.

Penjelasan Alur Proses Pengumpulan Data

Pada tahapan pertama produsen data melakukan pengumpulan, inventarisasi data pada lingkungan kerja sesuai dengan permintaan atau rencana kebutuhan data. Produsen data kemudian menyampaikan hasil inventarisasi data kepada wali data pendukung untuk melakukan pengesahan. Data yang sudah disahkan oleh walidata pendukung dapat langsung melakukan entri data pada aplikasi Dataku, sedangkan untuk data yang belum disetujui oleh walidata pendukung dikembalikan lagi ke produsen data untuk dilakukan revisi. Tahapan selanjutnya adalah walidata melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah dientri oleh walidata pendukung, berikut tahapan verifikasi dan validasi :



Gambar 3.
Sumber: Dokumen SOP Aplikasi Dataku DIY (2021)

Proses verifikasi dan Validasi data dilakukan sebelum proses diseminasi atau publikasi data. Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD) bersama dengan Badan Pusat Statistka DIY dan Bidang Sektoral melakukan proses verifikasi dan validasi elemen data. Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD) sebagai walidata mencermati kebutuhan data yang dibutuhkan di aplikasi Dataku, serta usulan dari OPD, Instansi, maupun pemerintah Kabupaten atau kota. Bidang sektoral memberika refrensi kebutuhan data sektoral dan BPS DIY sebagai Pembina data memberikan rekomendasi elemen data yang dibutuhkan. Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD), Badan Pusat Statistka DIY dan Bidang Sektoral kemudian melakukan identifikasi dan analisis sebagai bahan untuk melakukan verifikasi dan validasi elemen data. Hasil identifikasi dan analisis ini yang digunakan untuk melakukan verifikasi pada setiap data yang akan dimasukkan dalam aplikasi Dataku. Balai Penelitian dan Pengembangan dan Statiska Daerah (BPPSD) sebagai walidata melakukan tindak lanjut dari hasil verifikasi elemen data tersebut. Data yang tidak lolos verifikasi akan dikemblaikan pada instansi terkait untuk dilakukan revisi atau dihentikan, sedangkan data dan elemen data yang lolos verifikasi dan validasi akan dipublikasikan atau dilakukan desiminasi di aplikasi Dataku.

c) Pelibatan Pengguna

Adanya aplikasi Dataku yang memuat banyak informasi pembangunan pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, Lembaga Vertikal, serta Kabupaten atau Kota yang berada pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, tentu membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak yang ada. Adanya kolaborasi antar instansi pemerintah menjadi keharusan bagi pengelola aplikasi Dataku. Keterlibatan pengguna aplikasi Dataku ini menjadi penting untuk mengisi ketersediaan data yang ada pada aplikasi Dataku.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) selain menjadi pengguna juga memiliki keterlibatan dalam pengelolaan aplikasi ini. OPD dilibatkan dalam hal memasukkan data kedalam aplikasi ini. Data yang banyak dalam aplikasi ini membuat organisasi perangkat daerah sebagai wali data pendukung sekaligus produsen data dilibatkan dalam proses memasukan data. Para OPD dilibatkan guna efisiensi dalam proses memasukan data pada aplikasi, sehingga wali data tingkat provinsi hanya tinggal meverifikasi data yang sudah dimasukkan oleh OPD, lembaga horizontal, dan lembaga vertical yang ada pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini.

Adanya aplikasi Dataku ini juga dapat memberikan keterlibatan masyarakat umum bisa terlibat dalam mengawasi pembangunan, melalui data yang tersedia pada aplikasi ini. Peneliti ataupun akademisi juga bisa memanfaatkan aplikasi dataku untuk mencari data pendukung dalam bidang pembangunan khususnya, yang dari hasil penelitian dari peneliti ataupun akademisi tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pemda DIY untuk melakukan evaluasi kinerja terutama dalam bidang pembangunan.

Simpulan

Berdasarkan analisis yang dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan teori transformasi manajemen, bahwa aplikasi Dataku telah membawa perubahan dalam keterbukaan informasi publik baik bagi satuan perangkat kerja perangkat daerah, lembaga vertikal yang ada pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, masyarakat,

maupun peneliti dapat membuka data statistik pembangunan daerah dengan mudah. Pada dasarnya aplikasi Dataku ini berasal Sistem Informasi Daerah (SIPD) milik Kementerian Dalam Negeri yang disempurnakan oleh Bappeda. Proses penyiapan dalam aplikasi Dataku pada utamanya mengacu pada satu data pembangunan daerah, sehingga dalam penyiapan aplikasi ini berfokus pada efektifitas kebutuhan data yang ada pada satuan perangkat kerja perangkat daerah, lembaga vertikal yang ada pada provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Aplikasi Dataku membawa perubahan yang baik dalam perubahan manajemen data statistik pada lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Data-data bisa didapatkan dengan mudah hanya dengan membuka aplikasi,

Referensi

- Ardina, M., & Saharudin, E. (2021). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Bantul. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(1), 49–61. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v5i1.5667>.
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Urgensi Keterbukaan Informasi dalam Pelayanan Publik sebagai Upaya Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. 2(2), 218–234.
- Damanik, M. pandoporan. (2017). E - GOVERNMENT DAN APLIKASINYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Kasus KULitas Informasi Website Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau). *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 21(2), 151–164.
- Faisal, I. (2021). OPTIMALISASI KETERBUKAAN INFORMASI BAGI PRESTASI DAERAH. 1(3), 37–46.
- Febriananingsih, N. (2012). Keterbukaan Informasi Publik Dalam Pemerintahan Terbuka Menuju Tata pemerintahan Yang Baik. 1(April), 135–156. <https://doi.org/doi:http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v1i1.110>.
- Habibi, M. (2018). Dinamika Perkembangan Model E-Government. (May). <https://doi.org/10.5281/zenodo.1256429>.
- Harimurti, A., Djunaedi, A., & Kumorotomo, W. (2015). MODEL MANAJEMEN INFORMASI UNTUK MEWUJUDKAN KONSEP CONNECTED GOVERNMENT DI PEMDA DIY INFORMATION MANAGEMENT MODEL TOWARDS CONNECTED GOVERNMENT IN YOGYAKARTA SPECIAL PROVINCE. *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Komunikasi Dan Informatik*, 06(ISSN: 2087-0132), 17–35.
- Indah, T., Ilmu, P., Universitas, K., Indonesia, I., Hariyanti, P., Ilmu, P., ... Publik, K. I. (2018). Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Dinas Kominfo Kota Tasikmalaya. *Jurnal Komunikasi*, 12(November 2017), 127–140.
- Indrajit, eko R. (2006). *Electronic Government Konsep Pelayanan Publik Berbasis Internet dan Teknologi Informasi*. Jakarta: APTIKOM.
- Indrayani, E. (2020). *e-Government : Konsep , Implementasi dan Perkembangannya di*

Indonesia.

- Mutiarin, D. (2014). *Manajemen Birokrasi dan Kebijakan, Penulusuran konsep dan teori*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugrahani, F. (2014). *Peneilitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.
- Redjo, S. I. (2009). TRANSFORAMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN: KASUS KOTA BANDUNG. *Sosiohumaniora*, 11, 25–35.
- Retnowati, endang. (2008). KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK DAN GOOD GOVERNANCE (ANTARA DAS SEIN DAN DAS SOLLEN). *Perspektif*, Volume XVI(01), 54–61.
- Safaria, A. F., Muhtar, E. A., Irawati, I., Widianingsih, I., Pascasarjana, M., Publik, A., ... Bukit, J. (2018). Manajemen inovasi open data dalam layanan informasi publik pada pemerintah kota bandung. *Jurnal Untirta*, 09, 135–152. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31506/jap.v9i2.4759>.
- Suhendar, A. (2008). PEMERINTAH MENUJU GOOD GOVERNANCE (Implementasi Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008). *Jurnal Wacana Kinerja*, 13, 243–251.
- Suryani, D. A., Ekonomi, F., Website, P., Publik, I., Publik, B., & Yogyakarta, I. (2017). Mewujudkan Good Governance Badan Publik Negaradi Daerah Istimewa Yogyakarta Melalui Keterbukaan Informasi Publik. 12(April), 35–44.
- Suryani, D. A., Saharuddin, E., Barat, R., Mlangi, N., Gamping, N., Publik, P. A., ... Sleman, N. G. (2021). Percepatan Reformasi Birokrasi Melalui Budaya Keterbukaan Informasi di Daerah Istimewa Yogyakarta Perkembangan jaman di era instansi permohonan informasi disampaikan kepada unit atau bidang lain bukan. 9(1), 162–175.
- Trijayanto, D., Idrus, I. A., Sunter, J., Raya, P., Podomoro, S. A., Governance, G., & Publik, K. I. (2019). Peran ppid pemerintah kota yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. 3(14).
- Widanarto, A. (2019). TRANSFORMASI MANAJEMEN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN SUKABUMI Agustinus. *JURNAL ILMIAH WAHANA BHAKTI PRAJA*, 9(1), 75–94.
- Winardi, J. (2005). *Management of Change*. Jakarta: Prenada Media.